



pantau gambut

SWANELANGSA PANGAN DI LUMBUNG NASIONAL

Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah
Setelah Tiga Tahun Berlalu



2024

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia.

Penulis

Juma Maulana, Salsabila Khairunisa, Agiel Prakoso, Johan Wahyu Robiya, Wahyu Agung Perdana, Almi Ramadhi

Editor

Yoga Aprillianno, Iola Abas

Versi 1.0. dipublikasikan pada 18 Oktober 2024

Jaringan Pantau Gambut

Jl. Mimosa Blok F-2, Pejaten Barat
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
ask@pantaugambut.id

pantaugambut.id

Ilustrasi sampul depan ©Pantau Gambut



Studi ini dilisensi oleh Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hanya 1% dari total area
eks-PLG yang cocok
untuk pertanian

Studi ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Isu ini penting untuk mendapatkan perhatian mengingat presiden terpilih meletakkan Food Estate sebagai salah satu prioritas dalam visi-misinya. Sebagai salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mencapai ketahanan pangan, proyek ini justru berpotensi menimbulkan bencana ekologi maupun konflik sosial.

Politik pangan yang memanfaatkan krisis global akibat pandemi COVID-19 untuk mempercepat proyek pun menimbulkan banyak kritik. Mulai dari ketidaksesuaian lahan, dampak lingkungan—khususnya ekosistem gambut, hingga dampak terhadap masyarakat di sekitar proyek. Proyek ini pun berpotensi mengulangi kegagalan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Studi ini melakukan pemantauan pada 30 titik lokasi area eks-PLG di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau selama periode 2020 hingga 2023. Metode pemantauan menggunakan analisis kehilangan tutupan pohon, kebakaran hutan dan lahan, serta kesesuaian lahan untuk budidaya padi. Data yang digunakan berasal dari peta kerja proyek, citra satelit, dan pengujian tanah terkait kesuburan serta keasaman lahan gambut.

Temuan utama menunjukkan bahwa kondisi lahan di wilayah Food Estate mayoritas tidak sesuai untuk budidaya padi. Hanya 1% dari total area eks-PLG yang cocok untuk pertanian, sementara sisanya memiliki kesesuaian sedang hingga rendah. Lahan yang sudah dibuka sebagian besar ditinggalkan dan sebagian lainnya telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikuasai swasta.

Selain itu, kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di kawasan ini terus mengancam ekosistem gambut, menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan pelepasan emisi gas rumah kaca. Studi juga menemukan banyak lahan yang terbengkalai mengalami degradasi, dengan lapisan gambut yang semakin menipis atau bahkan hilang.

Kesimpulan dari studi ini adalah proyek Food Estate di Kalimantan Tengah mengulangi kesalahan proyek sejenis di masa lalu, dengan dampak yang merugikan lingkungan dan sosial. Proyek ini gagal mencapai tujuan ketahanan pangan, dan sebaliknya menciptakan kerusakan ekologis yang luas.

Pantau Gambut mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan proyek ini, serta memfokuskan upaya pada pemulihan ekosistem gambut. Selain itu, pemerintah harus mengutamakan pendekatan kedaulatan pangan berbasis lokal yang lebih sesuai dengan kondisi lahan gambut, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam.



Bukaan lahan yang disiapkan untuk proyek ekstensifikasi Food Estate di Desa Palingkau Jaya, Kabupaten Kapuas Murung, Kalimantan Tengah ©Pantau Gambut 2024

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	3
1. Latar Belakang	4
2. Metode Pemantauan	9
2.1. Metode Pemilihan Area Pemantauan	9
2.2. Metode Analisis Kesesuaian Lahan	11
3. Hasil Pemantauan	15
3.1. Dibuka Untuk Diabaikan	15
3.2. Bukan Padi, Tapi Sawit	17
3.3. Kehilangan Tutupan Pohon pada Area Ekstensifikasi	20
3.4. Kebakaran Hutan dan Lahan di Area Eks-PLG	22
3.5. Kesesuaian Lahan Pertanian Padi	24
4. Kesimpulan dan Rekomendasi	27
4.1 Kesimpulan	27
4.2 Rekomendasi	28

Food Estate Kalimantan Tengah menjadi pelanggaran yang parah terhadap kedaulatan pangan para petani lokal.

1. LATAR BELAKANG

Awal Bencana

Penghujung 1997–1998 menjadi momen yang menyesakkan bagi rakyat Indonesia. Di tengah gejolak politik yang semakin dinamis, asap pekat beracun dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bergerak liar menyelimuti sebagian besar Pulau Kalimantan dan Sumatra. Asap ini ibarat benda yang paling intens diekspor ke negara tetangga periode tersebut. Singapura, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, hingga Australia ikut merasakannya.¹

Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang merasakan pekatnya asap. Semua berkat Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare (*Mega Rice Project*). Soeharto sebagai Presiden RI kala itu mencanangkan proyek seluas 1.385.280 hektare ini sebagai respons terhadap melonjaknya impor beras Indonesia pada 1993.² Targetnya ambisius. Soeharto menargetkan produksi beras tahunan hingga 2,7 juta ton per tahun.³ Meski begitu, target ini bertentangan dengan program lain yang juga digencarkannya, yaitu program diversifikasi pangan.⁴

Untuk mencapai target yang luar biasa besar, proses pengerjaannya sembrono. Petani dari Jawa dan Bali didatangkan ke Kalimantan lewat program transmigrasi. Namun, karakteristik lahan pertanian yang mereka hadapi di Kalimantan ternyata berbeda dengan yang biasa mereka kerjakan di Jawa ataupun Bali. Lahan gambut yang memiliki tingkat keasaman (pH) tinggi membuatnya sulit diolah untuk ditanami padi sawah.

Sebagian petani transmigran akhirnya menyerah dengan kondisi tanah yang miskin nutrisi⁵ dan mayoritas meninggalkan sejutaan hektare lahan yang sudah dibuka. Sementara, sebagian lainnya mencoba bertahan dan berjuang untuk menemukan bibit serta pola tanam baru yang dapat bertahan dengan karakter lahan di sana.

Kesulitan yang ada membuat capaian proyek ini berada di bawah target. Dari target pencetakan sawah seluas 1,45 juta hektare, hanya sekitar 110 ribu hektare lahan yang terealisasi.⁶ Tidak

1 Tropical Rainforest. *The Asian Forest Fires of 1997-1998*. https://worldrainforests.com/08indo_fires.htm

2 Gamma Galudra et al. 2010. *Hot Spot of Emission and Confusion: Land Tenure Insecurity, Contested Policies and Competing Claims in the Central Kalimantan Ex-Mega Rice Project Area*. World Agroforestry Centre Working Paper nr 98.

3 Tropical Rainforest. *Loc.Cit*.

4 Hendaru Tri Hanggoro. 2021. *Dari Swasembada Beras ke Swasembada Pangan*. <https://historia.id/ekonomi/articles/dari-swasembada-beras-ke-swasembada-pangan-P74KE/page/1>

5 Jenny Goldstein. 2016. *Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project*. <https://www.environmentandsociety.org/arcadia/carbon-bomb-indonesias-failed-mega-rice-project>

6 Pantau Gambut. 2021. *Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi*.

**Pemerintah
Joko Widodo
terlihat seperti
sengaja
menjatuhkan
diri ke lubang
yang sama.**

terpenuhinya target ini diindikasikan akibat perencanaan yang memang sudah asal-asalan dan diperparah dengan lemahnya pengawasan dalam implementasi. Tentu bukan capaian yang baik mengingat sokongan anggaran yang diberikan untuk proyek ini sangat besar. Bahkan, proyek ini dicurigai mengalami kerugian keuangan negara yang mencapai 1,97 triliun rupiah.

Karena sembrono, cita-cita swasembada pangan pun menjadi bumerang. Selain target produksi yang tidak terpenuhi, bencana ekologi datang dengan konsekuensi yang mengerikan. Setidaknya api membakar 730.000 hektare area hutan Indonesia pada tahun 1997–1998⁷. Jika digambarkan, luasan ini sama dengan 11 kali luas Provinsi Jakarta.

Lahan-lahan yang terbengkalai dari proyek sejuta hektare ini pun kini telah beralihfungsi menjadi perkebunan sawit milik sembilan korporasi besar.⁸

Menjatuhkan Diri ke Lubang yang Sama

Peribahasa hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama nampaknya cocok untuk menggambarkan perjalanan Food Estate. Bedanya, pemerintahan Joko Widodo justru terlihat seperti sengaja menjatuhkan diri ke lubang yang sama. Meski sudah dua puluh tiga tahun berlalu, dirinya berambisi mengulang jejak Soeharto.

Pada 2020, dirinya meresmikan program Food Estate di area eks-PLG⁹ dengan alasan ancaman krisis pangan global akibat pandemi COVID-19.¹⁰ Setahun berselang, kegagalan Food Estate segera nampak. Pada 2021, data Kementerian Pertanian RI menunjukkan bahwa hasil intensifikasi sawah tidak produktif di Kalimantan Tengah hanya mencapai 3,5 ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektare.¹¹ Padahal, panen padi idealnya menghasilkan minimal 4 ton per hektare.¹²

Selain padi, Pantau Gambut juga menemukan bahwa umbi singkong yang ditanam untuk Food Estate di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, berukuran kecil menyerupai wortel, berwarna

7 Pantau Gambut. *Food Estate, #KenapaBuruBuru?*. <https://foodestate.pantaugambut.id/>

8 Indra Nugraha. 2020. *Pelibatan Petani dalam Proyek Food Estate di Kalteng Tak Jelas*. <https://www.mongabay.co.id/2020/09/24/pelembatan-petani-dalam-proyek-food-estate-di-kalteng-tak-jelas/>

9 Reza Felix Citra. 2024. *Program Food Estate: Dari Rencana Hingga Realitas*.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/program-food-estate-dari-rencana-hingga-realitas>

10 FAO. 2020. *FAO Director General video message on Global Report on Food Crises 2020 edition*. <https://www.youtube.com/watch?v=ohpyxqjB6V4>

11 Diani Nafitri, Agiel Prakoso, Yoga Aprillianno. 2023. *Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu*.

12 *Ibid.*

kuning seperti kunyit, dan rasanya pahit. Karakter ini mengindikasikan adanya kandungan sianida yang tinggi.¹³

Kegagalan ini semakin diperkuat oleh catatan Global Food Security Index 2022. Terdapat jarak yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim pangan yang berketahanan dan berkelanjutan, sekalipun dinilai mampu menjamin keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.¹⁴ Pada periode tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-83 dari 113 negara dan memiliki performa terlemah pada keberlanjutan dan adaptabilitas pangan dibandingkan kategori lainnya.¹⁵

Di tengah krisis iklim yang semakin parah, keberlanjutan program Food Estate menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, karhutla masih terus terjadi sejak tahun 1997 dan melepaskan ratusan ribu ton karbon dioksida ke udara di kawasan eks-PLG ini.¹⁶ Kegagalan yang nampak terang benderang dan ancaman ledakan 'bom karbon', seharusnya bisa menyadarkan pemerintah akan rapuhnya ekosistem ini. Sayangnya, fakta ini tetap tak menghentikan pemerintah Indonesia untuk melakukan perluasan (ekstensifikasi) area Food Estate pada 2022.

Konsep ketahanan pangan yang didorong oleh pemerintah lewat Food Estate juga perlu mendapatkan kritik. FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi dimana semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang memadai, aman, dan bergizi setiap waktu. Kebutuhan nutrisi dan preferensi pangan mereka untuk hidup yang sehat dan aktif pun terpenuhi.

Namun, konsep ketahanan pangan dari FAO tersebut juga bukan tanpa celah. Fokus pada ketersediaan pangan tanpa memperhatikan petani sebagai subjek utama pada akhirnya akan mendorong pemenuhan pangan untuk bergantung pada pasar bebas dan fluktuasi harga.¹⁷ Kondisi ini menjadi tidak ideal. Aspek keberlanjutan dan kedaulatan hak atas pangan tidak menjadi prioritas dalam konsep ketahanan pangan. Padahal, kedaulatan pangan harus mendapatkan perhatian lebih karena setiap orang, bangsa, negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks produksi lokal.¹⁸

Fakta yang ada membuktikan Joko Widodo tidak lebih baik dari Soeharto. Pola pembangunan yang dilakukan keduanya mirip: masif, tergesa-gesa, dan menjadikan 'krisis' sebagai basis legitimasinya.

Perkembangan Terbaru Food Estate Kalimantan Tengah

Awalnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yakin akan keberhasilan proyek Food Estate. Joko Widodo yang mengorkestrasikan ketiganya beralasan kesuksesan proyek ini bisa tercapai karena adanya 4.000 km kanal buatan peninggalan PLG

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Global Food Security Index. 2022. Economist Impact, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nuthammacot, N., Phairuang, W., Stratouillas, D.. 2019. *Estimation of Carbon Emission in the Ex-Mega Rice Project, Indonesia Based on SAR Satellite Images*. Applied Ecology and Environmental Research, 17(2). https://www.aloki.hu/pdf/1702_24892499.pdf.

¹⁷ Gusti Nur Asla Shabia. 2021. 'Hak Atas Pangan dan Gizi, Sebuah Pengantar' dalam *Pangan untuk Siapa? Politik Pangan di Indonesia dan Marginalisasi yang Mengiringi*. Jurnal Hak Atas Pangan dan Gizi Edisi 01. FIAN Indonesia, hlm. 3-4.

¹⁸ Via Campesina. 2021. Food Sovereignty | Explained. <https://viacampesina.org/en/food-sovereignty/>.

sebagai sistem pengairan untuk pertanian padi. Namun, ternyata semua tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kanal maupun irigasi yang tidak sesuai standar maupun topografi, sehingga berpotensi menimbulkan banyak masalah.

Kawasan eks-PLG ini didominasi oleh lahan gambut yang berkarakter asam. Perlu ada perlakuan khusus untuk merekayasa karakter lahan sehingga tanaman non-endemik dapat tumbuh dengan baik. Meski begitu, rekayasa ini harus dilakukan dengan seksama untuk mencegah kerusakan lahan. Jika sampai terjadi degradasi lahan, ekosistem ini tidak akan bisa lepas dari bencana sepanjang tahun. Iklim tropis basah yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun membuat kawasan ini rentan banjir. Sementara di musim kemarau, suhu rata-rata yang mencapai 26°C hingga 30°C¹⁹ meningkatkan potensi karhutla secara signifikan.²⁰

Pemantauan terhadap Food Estate yang telah Pantau Gambut lakukan pada tahun 2022²¹ dan 2023²² juga mengungkap penelantaran area gambut yang telah dibuka dengan luasan yang masif. Fakta ini setidaknya bisa menggambarkan bagaimana persiapan dan studi awal proyek ambisius pemerintah ini.

Rentetan masalah yang sudah Pantau Gambut saksikan, catat, dan publikasikan sejak 2022, nyatanya tidak menghentikan ambisi pemerintah. Joko Widodo melalui Kementan melakukan ekstensifikasi hingga 16.643,6 hektare di Kab. Kapuas dan Kab. Pulang Pisau sebagai dukungan proyek Food Estate.²³ Hanya Kab. Katingan yang tidak mendapatkan perluasan proyek ini. Situasi ini yang mendorong Pantau Gambut melanjutkan pemantauan pada kelanjutan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Food Estate Kalimantan Tengah jelas menjadi pelanggaran yang parah terhadap kedaulatan pangan para petani lokal. Proyek ini telah memaksa mereka menanam komoditas yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, seperti singkong dan beras padi dengan varietas yang tidak cocok ditanam di lahan gambut dan belum tentu mereka konsumsi sendiri.

Publikasi ini hendak mengupas ‘perencanaan bencana’ tersebut dengan menyoroti perkembangan kondisi Food Estate di areal eks-PLG, Kalimantan Tengah hingga 2023. Perkembangan tersebut beberapa diantaranya mencakup area ekstensifikasi, temuan kehilangan tutupan pohon (*tree cover loss*), area terbakar (*burned area*), terbenkainya lahan yang sudah dibuka, dan ketidaksesuaian lahan gambut untuk ditanami padi.

Jika para filsuf bersabda ‘sejarah berulang’, maka publikasi ini mengajukan pertanyaan besar: sejarah mana yang hendak kita ulang? Apakah kita hendak mengulang sejarah penuh tragedi atau menciptakan sejarah baru dengan menghentikan pola penghancuran alam berkedok ketahanan pangan demi kedaulatan dan keberlanjutan pangan yang hakiki?

19 Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. 2020. *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*.

20 Widjaja-Adhi, I P.G. 1997. *Developing tropical peatlands for agriculture*. In: J.O. Rieley and S.E. Page (Eds.), pp. 45-54. *Biodiversity And Sustainability Of Tropical Peat And Peatland*. Proceedings Of The International Symposium On Biodiversity, Environmental Importance And Sustainability Of Tropical Peat And Peatlands, Palangka Raya, Central Kalimantan 4-8 September 1999. Samara Publishing Ltd. Cardigan. UK.

21 Oriz A. Putra, Desti Ayunda, Agiel Prakoso, Iola Abas. 2022. *Jilid 1: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berjalan*.

22 Diani Nafitri, Agiel Prakoso, Yoga Aprilliano. *Loc.Cit.*

23 Tempo.co. 2022. Kementan Realisasi Ekstensifikasi Lahan di Kalimantan untuk Food Estate. <https://nasional.tempo.co/read/1600361/kementan-realisasi-ekstensifikasi-lahan-di-kalimantan-untuk-food-estate>.



Eskavator yang sedang membuka lahan untuk perkebunan sawit PT WUL yang berdekatan dengan ekstensifikasi Food Estate di Desa Tajepan, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ©Pantau Gambut 2024

2. METODE PEMANTAUAN

Pantau Gambut melakukan pemantauan pada perkembangan area ekstensifikasi proyek Food Estate di Kalimantan Tengah yang telah berjalan selama tiga tahun sejak tahun 2020. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2021–2023 pemerintah terpantau melakukan ekstensifikasi area Food Estate. Hal ini terlihat dari Peta Kerja Proyek Studi Investigasi Desain (SID) Food Estate Kalimantan Tengah. Area dalam peta kerja SID tersebut merupakan lahan yang akan dijadikan area ekstensifikasi Food Estate yang sebagian besarnya berada pada kawasan eks-PLG.

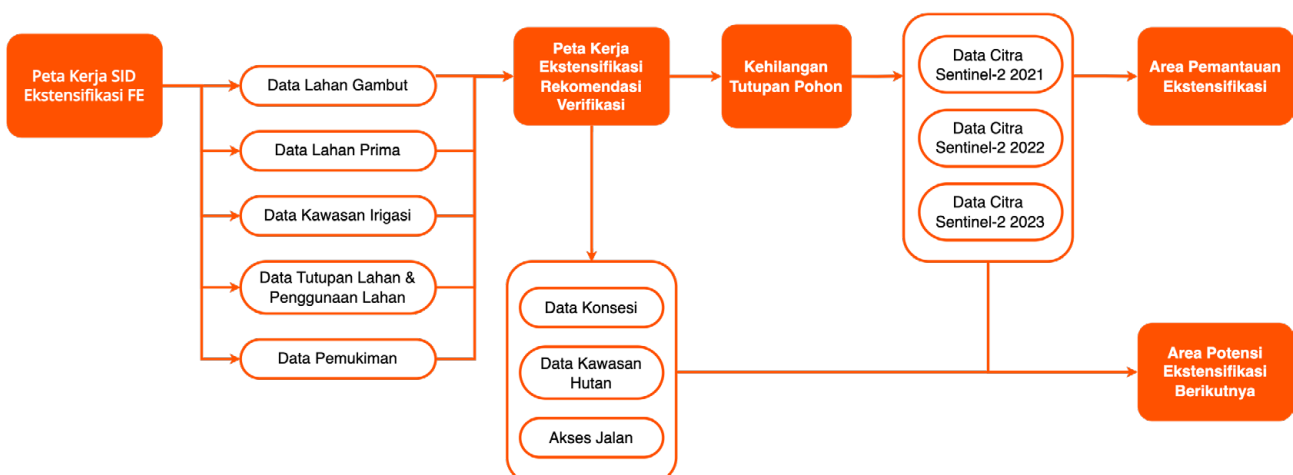
Analisis dan verifikasi pada pemantauan area ekstensifikasi ini difokuskan menjadi 2 yakni:

1. Kehilangan tutupan pohon dan karhutla tahun 2023
2. Kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian padi pada area ekstensifikasi.

Sembilan belas lokasi yang tersebar di Kab. Kapuas dan Kab. Pulang Pisau menjadi sampel pengamatan.

2.1. Metode Pemilihan Area Pemantauan

Gambar 1 Diagram Alir Pemilihan Lokasi Pemantauan Ekstensifikasi Food Estate Kalimantan Tengah



Basis utama pemilihan lokasi pemantauan studi ini adalah data Proyek Kerja SID yang didapatkan dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Data ini kemudian

dianalisis dengan melakukan tumpang susun (*overlay*) terhadap berbagai data pendukung seperti Kawasan Lahan Prima dan data pendukung lainnya. Menurut UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Lahan Prima adalah lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan. Penggunaan data ini terkait dengan informasi baik atau tidaknya kualitas lahan dalam menumbuhkan tanaman budidaya.

Dalam konteks Food Estate, data ini bisa memberikan gambaran apakah lahan yang menjadi bagian dari ekstensifikasi cocok untuk ditanami komoditas padi. Kesesuaian tersebut kemudian disandingkan dengan kajian analisis kesesuaian lahan gambut pada area ekstensifikasi Food Estate. Sehingga, peta yang ditumpang susun ini bisa menggambarkan apakah calon sawah berada di dalam kawasan gambut dan cocok untuk ditanam di lokasi tersebut. Selain data Lahan Prima, beberapa data lain juga digunakan untuk memperkuat basis pemilihan area sampel pemantauan seperti yang ada di tabel berikut.

Tabel 1 Data Pendukung Pemilihan Area Sampel Pemantauan

No	Data	Sumber
1	Peta SID Sebaran Proyek Ekstensifikasi Food Estate Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kalteng
2	Data Lahan Prima Kawasan Eks-PLG	KLHK & BAPPENAS
3	Data Kawasan Irigasi & Non Kawasan Eks-PLG	KLHK
4	Data Konsesi PBPH & HGU	KLHK & ATR/BPN
5	Data Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 2017	KLHK
6	Data Area Penggunaan Lahan 2021–2022	KLHK
7	Data Tutupan Lahan 2021–2022	KLHK
8	Data Citra Satelit Sentinel-2 2021–2023	European Space Agency (ESA)

Setelah tumpang susun berbagai data berhasil menemukan beberapa titik rekomendasi, proses validasi dilakukan menggunakan penginderaan citra satelit. Dengan membandingkan situasi sebelum dan sesudah kegiatan ekstensifikasi yang didapatkan melalui citra satelit, kita dapat melihat perubahan pola tutupan lahan pada titik yang telah ditandai. Perubahan pola tutupan lahan akan menjadi basis validasi bahwa telah terjadi kegiatan perluasan Food Estate di titik tersebut.

Hasil analisis dari data pendukung dan validasi citra satelit yang telah terkumpul menjadi basis Pantau Gambut untuk melakukan pemantauan secara langsung. Dari hasil tumpang susun dan pemantauan citra satelit, terdapat 30 titik lokasi pemantauan yang tersebar di 19 desa dalam 5 kecamatan di Kabupaten Kapuas dan 1 kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2 Lokasi Pengamatan

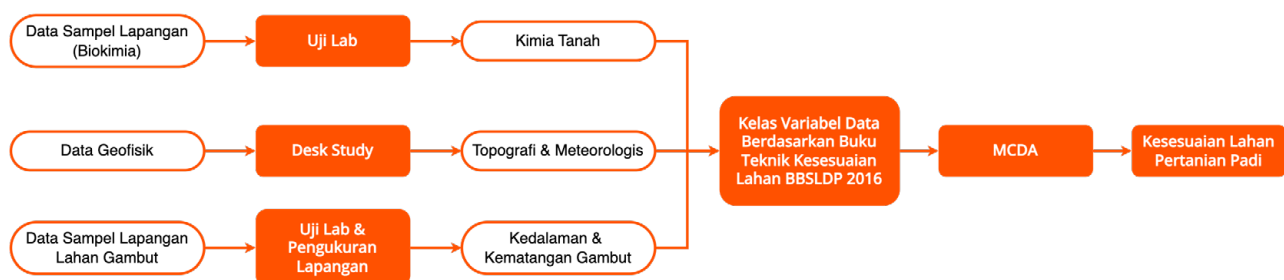
No	Nama Desa	Kecamatan	Kab/Kota
1	Tajepan	Kapuas Murung	Kapuas
2	Palingkau Jaya	Kapuas Murung	Kapuas
3	Palingkau Asri	Kapuas Murung	Kapuas
4	Penda Katapi	Kapuas Barat	Kapuas

No	Nama Desa	Kecamatan	Kab/Kota
5	Mandomai	Kapuas Barat	Kapuas
6	Pantai	Kapuas Barat	Kapuas
7	Sei Kayu	Kapuas Barat	Kapuas
8	Sei Dusun	Kapuas Barat	Kapuas
9	Pangkalan Sari	Basarang	Kapuas
10	Basarang	Basarang	Kapuas
11	Pangkalan Rekan	Basarang	Kapuas
12	Tambun Raya	Basarang	Kapuas
13	Basungkai	Basarang	Kapuas
14	Maluen	Basarang	Kapuas
15	Tarung Manuah	Basarang	Kapuas
16	Murung Karamat	Selat	Kapuas
17	Betawi Permai	Bataguh	Kapuas
18	Budi Mufakat	Bataguh	Kapuas
19	Mintin	Kahayan Hilir	Pulang Pisau

2.2.

Metode Analisis Kesesuaian Lahan

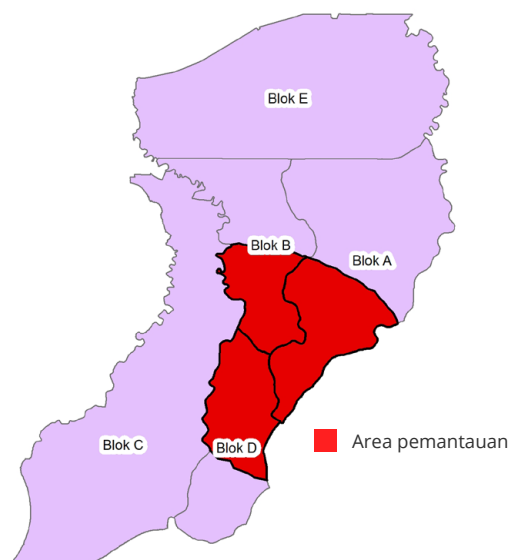
Gambar 2 Diagram Alir Analisis Penilaian Kesesuaian Lahan Food Estate Kalimantan Tengah



Pemilihan titik sampel pemantauan penting untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keseluruhan lahan. Untuk itu, Pantau Gambut mengambil tiga dari lima blok lahan eks-PLG sebagai sampel pemantauan proyek Food Estate untuk penanaman komoditas padi. Blok A, B, dan D yang memiliki total luasan 243.216 hektare, dipilih karena memenuhi kriteria keterwakilan area ekstensifikasi dan kondisi tutupan lahan.

Langkah selanjutnya adalah uji laboratorium untuk menganalisis sifat kimia tanah dan uji kematangan tanah gambut. Pengujian ini dilakukan di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Palangkaraya.

Gambar 3 Peta Blok Eks-PLG



Setelah mendapatkan hasil laboratorium, Pantau Gambut melanjutkan analisis menggunakan pendekatan kesesuaian lahan yang dikembangkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSLDP) pada tahun 2016.²⁴ Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti sifat kimia tanah, kondisi topografi, dan meteorologis serta kondisi lahan gambut pada area yang sedang dianalisis.²⁵ Berikut adalah data-data yang digunakan dalam analisis ini:

Tabel 3 Parameter Pengukuran Tingkat Kesesuaian Lahan

No	Parameter	Sumber
Parameter Sifat Kimia Tanah		
1	ph H ₂ O	Sampel Lapangan (Laboratorium)
2	N-Total	Sampel Lapangan (Laboratorium)
3	C-Organik	Sampel Lapangan (Laboratorium)
4	P-Bray I	Sampel Lapangan (Laboratorium)
5	K-dd	Sampel Lapangan (Laboratorium)
6	KTK	Sampel Lapangan (Laboratorium)
Parameter Lahan Gambut		
7	Kedalaman Gambut	Sampel Lapangan (Laboratorium) & Data Gambut 2019 (spasial)
8	Kematangan Gambut	Sampel Lapangan (Laboratorium) & Data Gambut 2019 (spasial)
Parameter Kondisi Topografi, Meteorologis, dan Bahaya		
9	Temperatur	Data Modis LST Daily 2019–2023
10	Kerapatan Kanal	Data Sebaran Jaringan Kanal BRGM
11	Kelerengan	Data DEMNAS
12	Curah Hujan	Data CHIRPS Daily 2019–2023
13	Tingkat Bahaya Erosi	Data Analisis Pantau Gambut 2024
14	Kerawanan Banjir	Data Analisis Pantau Gambut 2024

Parameter sifat kimia tanah berfungsi untuk menilai kualitas serta kemampuan tanah dalam mendukung aktivitas pertanian. Sebut saja kandungan nutrisi, tingkat keasaman (pH), dan kapasitas penyerapan unsur hara yang penting bagi tanaman. Sementara, parameter topografi dan meteorologi digunakan untuk memahami kondisi geofisik lahan. Beberapa di antaranya kemiringan, ketinggian, iklim, dan bahaya lingkungan yang berpengaruh pada tingkat kesesuaian lingkungan bagi kegiatan pertanian. Kedalaman gambut juga menjadi faktor penting yang dinilai untuk mengetahui karakteristik tanah, khususnya dalam kaitannya dengan kedalaman, kematangan, kestabilan, terhadap produktivitas lahan secara keseluruhan.²⁶

Data-data ini dianalisis secara spasial menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dengan mempertimbangkan setiap parameter terhadap kelasnya. Metode ini melibatkan penilaian setiap parameter dengan *Analytic Hierarchy Process* (AHP)²⁷ yang memungkinkan setiap parameter diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya.

24 Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian Strategis Tingkat Semi Detail Skala 1:50.000, 2016

25 Widiatmaka, Ambarwulan, W., Santoso, P. B. K., Sabiham, S., Machfud, & Hikmat, M. 2016. *Remote Sensing and Land Suitability Analysis to Establish Local Specific Inputs for Paddy Fields in Subang, West Java*. *Procedia Environmental Sciences*, 33, 94–107. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.061>

26 Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian Strategis Tingkat Semi Detail Skala 1:50.000, 2016

27 Adrian, Widiatmaka, Munibah, K., & Firmansyah, I. 2022. *Evaluate land suitability analysis for rice cultivation using a GIS-based AHP multi-criteria decision-making approach: Majalengka Regency, West Java Province*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1109(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1109/1/012062>

Setelah itu, setiap parameter dikelaskan dan dikalikan dengan nilai bobotnya untuk menghasilkan nilai kesesuaian lahan.²⁸ Hasil kelas kesesuaian lahan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu pendekatan tinggi, sedang, dan rendah.²⁹ Berikut pengelompokan kesesuaian lahan:

Tabel 4 Pengelompokan Kesesuaian Lahan

No	Faktor Karakteristik Lahan	Tinggi	Sedang	Rendah
Topografi, Meteorologis, dan Bahaya				
1	Temperatur rata-rata tahunan (°C)	25–28	>28–30 dan 23–<25	>30–33 dan 21–<23
2	Lereng (%)	<3	3–5	5–8
3	Bahaya erosi	-	Sangat ringan	Ringan
4	Bahaya banjir	-	Ringan	Sedang
5	Jaringan kanal	Rapat	Agak rapat	Sedang
Lahan Gambut				
6	Kedalaman Gambut	<50	50–100	100–150
7	Kematangan Gambut	Saprik	Saprik dan hemik	Hemik
Sifat Kimia Tanah				
8	Retensi hara (nr) - KTK tanah (cmol/kg)	>16	5–16	<5
9	Retensi hara (nr) - pH H ₂ O	5,5–7,0	4,5–5,5 dan 7,0–8,0	<4,5 dan >8,0
10	Retensi hara (nr) - C-organik (%)	>1,2	0,8–1,2	<0,8
11	Hara tersedia (na) - N total (%)	Sedang	Rendah	Sangat rendah
12	Hara tersedia (na) - P ₂ O ₅ (mg/100 g)	Tinggi	Sedang	Rendah–sangat rendah
13	Hara tersedia (na) - K ₂ O (mg/100 g)	Sedang	Rendah	Sangat rendah

28 Robertson, N., & Oinam, B. 2023. *Rice suitability mapping using the analytic hierarchy process approach in a river catchment*. Global Journal of Environmental Science and Management, 9(1), 141–156. <https://doi.org/10.22034/GJESM.2023.01.11>

29 Disesuaikan dengan buku panduan kesesuaian lahan pertanian BBSLDP 2016



Lahan Food Estate yang sudah dibuka dan dibelah oleh kanal untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit di Desa Tajepan, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ©Pantau Gambut 2024

3. HASIL PEMANTAUAN

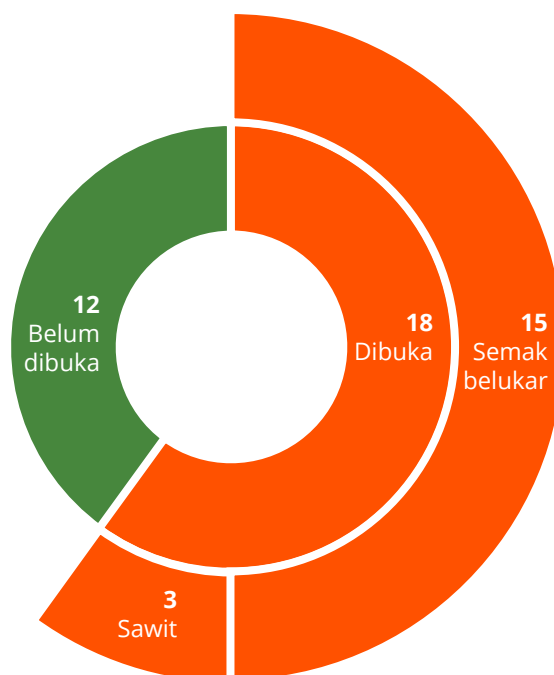
3.1.

Dibuka Untuk Diabaikan

Lahan peninggalan eks-PLG pada umumnya ditumbuhi oleh semak belukar setinggi orang dewasa (1–2 meter). Meski terlihat cukup tinggi, semak ini hanya menyerupai rerumputan dan bukan pohon. Semak belukar ini tumbuh subur karena pohon yang sebelumnya menutupi lahan ini telah dibabat habis. Namun, lahan yang sudah terbuka tersebut kemudian ditinggalkan karena proyek PLG sejuta hektare telah gagal dan berakhir ditinggalkan.

Lahan bersemak belukar yang dikategorikan sebagai lahan yang belum dibuka tersebut dapat dijumpai pada 12 dari 30 titik yang Pantau Gambut kunjungi. Sementara sebagian lainnya telah mengalami pembukaan lahan untuk pencetakan sawah baru. Meski begitu, lahan yang sudah dibuka tidak lantas menjadi sawah. Dari 18 titik sampel yang telah dibuka, 15 titik dibiarkan terbuka dan terbengkalai hingga kembali ditutupi oleh semak belukar. Anehnya, tutupan lahan pada 3 titik sampel telah berubah menjadi perkebunan sawit karena diakuisisi oleh perusahaan perkebunan sawit (lihat sub-bab 3.2).

Gambar 4 Proporsi Lahan Food Estate pada 30 Titik Sampel



Tidak ada kejelasan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pemerintah di area terlantar ini. Selain lahannya yang diabaikan, nasib warga di sana juga terkatung-katung. Para petani yang tinggal di dekat area ekstensifikasi harus hidup di tengah lahan yang diklaim oleh pemerintah. Ruang hidup dan penghidupan mereka pun menyempit.

Masyarakat juga tidak pernah dilibatkan dalam pengerjaan proyek ini. Tidak pernah ada pendampingan apa pun dari pemerintah terkait pertanian yang menghampiri mereka. Ini termasuk pendampingan untuk menyesuaikan diri pada proyek besar yang masuk ke wilayah mereka. Jika terus dipaksa, petani-petani ini hanya akan menjadi korban selanjutnya yang masuk ke dalam lubang kesalahan pemerintah jaman dulu.



Lahan terbengkalai yang menjadi area ekstensifikasi Food Estate di Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ©Pantau Gambut 2024

Inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan juga menjadi masalah. Pemerintah memasukkan Desa Betawi Permai dan Pulau Kidang ke dalam Peta Kerja SID mengenai rencana awal pelaksanaan proyek ini. Pada 2020, mereka pun sudah mengumpulkan masyarakat kedua desa untuk menyosialisasikan bahwa sebagian wilayah desa akan dijadikan lokasi pelaksanaan perluasan Food Estate. Namun, hingga Pantau Gambut turun ke lapangan pada pertengahan 2024, tidak ada kegiatan apa pun di desa mereka.

Kondisi lahan pada desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan Food Estate dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Kondisi Lahan di Desa Lokasi Ekstensifikasi Food Estate

No	Nama Desa	Kabupaten	Kondisi
1	Tajepan	Kapuas	Terbengkalai (dibuka oleh PT WUL)
2	Penda Katapi	Kapuas	Ditanami sawit
3	Pangkalan Asri	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar & sawah tanpa perawatan)
4	Mandomai	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar)
5	Pantai	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar & sawah tanpa perawatan)
6	Tambun Raya	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar)

No	Nama Desa	Kabupaten	Kondisi
7	Basungkai	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar)
8	Murung Kramat	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar)
9	Palingkau Jaya	Kapuas	Ditanami sawit
10	Palingkau Asri	Kapuas	Ditanami sawit
11	Maluen	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar)
12	Sei Dusun	Kapuas	Ditanami oleh masyarakat
13	Sei Kayu	Kapuas	Terbengkalai (semak belukar)

Perubahan vegetasi ini nyatanya akan berdampak serius terhadap lingkungan di sekitar lokasi pembukaan hutan dan kanalisasi yang dilakukan secara masif pasca program PLG. Karhutla yang terus menerus, pencemaran air, pelepasan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), hingga yang paling menakutkan adalah hilangnya lapisan gambut itu sendiri sebagai pertanda terjadinya kehilangan fungsi ekologis gambut.³⁰

Kekhawatiran tersebut pun benar kami temukan: beberapa titik pemantauan yang tidak lagi memiliki lapisan gambut. Semua titik yang menjadi sampel pemantauan seharusnya masih memiliki kedalaman gambut di atas 20 cm.³¹ Namun, dari 30 titik sampel area yang masuk ke dalam rencana cetak sawah baru, hanya 5 titik yang masih dilapisi oleh gambut. Beberapa titik pun hanya memiliki ketebalan gambut 5 cm.

Temuan ini menjadi bukti bahwa ada korelasi antara deforestasi dan pengeringan gambut terhadap hilangnya lapisan tanah gambut. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji laboratorium, titik-titik yang dipantau dominansi menunjukkan sebagai tanah mineral dengan tingkat keasaman yang tinggi.

3.2. Bukan Padi, Tapi Sawit

Tidak hanya lahan-lahan terbengkalai saja yang Pantau Gambut temukan di lapangan. Cukup mengejutkan ketika area yang digadang bisa mencukupi kebutuhan pangan, justru ditumbuhi oleh tanaman sawit milik perusahaan. Temuan di Desa Palingkau Jaya, Desa Palingkau Asri, dan Desa Tajepan.

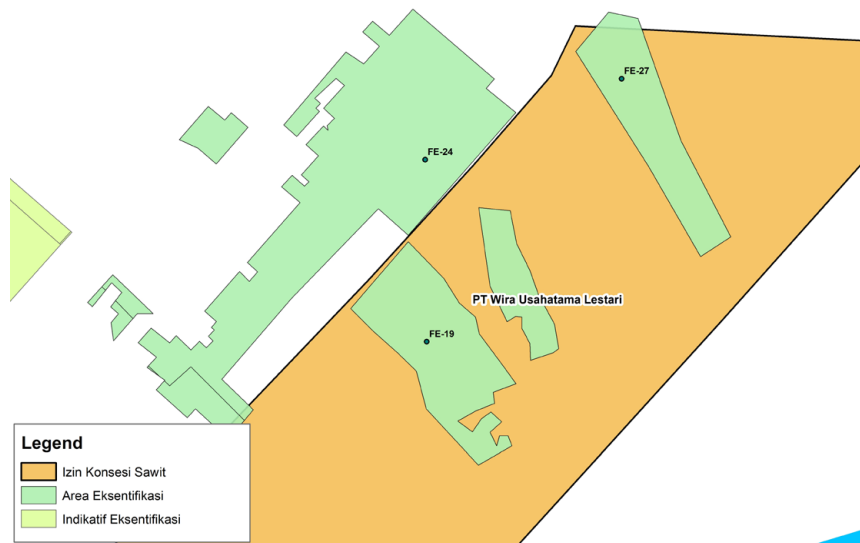
Kedua lokasi tersebut telah dibuka oleh pemerintah pada tahun 2022. Waktu berjalan, keduanya tidak kunjung digarap. Minimnya porsi partisipasi masyarakat yang diberikan pemerintah sejak awal, membuat akses tanah menjadi terbatas bagi warga. Keterbatasan akses ini pun membuat warga tidak bisa berbuat apa pun. Lahan terbuka yang menjadikannya miskin biodiversitas ini akhirnya hanya ditumbuhi semak belukar.

Menurut informasi dari warga desa, kondisi yang terbengkalai tersebut mendorong PT Wira Usahatama Lestari (WUL) membeli lahan tersebut melalui salah satu perangkat desa yang saat itu masih menjabat. Area yang sebelumnya dicadangkan sebagai lumbung pangan nasional tersebut kini telah dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan sawit oleh PT WUL.

30 Wirdati Irma, Totok Gunawan, Suratman. 2018. *Pengaruh Konversi Lahan Gambut Terhadap Ketahanan Lingkungan di DAS Kampar Provinsi Riau Sumatera*. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 24, No 2, Agustus 2018: 170-191. <http://dx.doi.org/10.22146/jkn.36679>

31 Berdasarkan data shapefile gambut milik BPSLDP 2019.

Gambar 5 Peta Tumpang Susun Kawasan Ekstensifikasi Food Estate & Area Konsesi PT WUL
Sumber: Hasil Olahan Pantau Gambut



Melalui analisis spasial, Pantau Gambut menemukan area seluas 274,67 hektare PT WUL yang terkonfirmasi masuk ke dalam lokasi ekstensifikasi Food Estate. Lokasi ini tepat berada di dalam titik lokasi FE 19, 24 dan 27 yang sesuai dengan Peta Kerja SID di Desa Tajepan dan Palingkau Asri, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas.

Kecurigaan adanya pelanggaran pun mengemuka. Hal ini mengingat adanya perusahaan perkebunan dengan izin HGU di dalam Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 24 Tahun 2020. Padahal, perusahaan dengan izin HGU hanya diperbolehkan untuk beroperasi di atas Area Penggunaan Lain (APL). Pasal 6 Permen LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, sudah mengatur penggunaan area ini.



Pembukaan lahan PT Wira Usahatama Lestari (WUL) yang bertumpang tindih dengan area ekstensifikasi Food Estate
©Pantau Gambut 2024



Lahan PT Wira Usahatama Lestari (WUL) yang bertumpang tindih dengan area ekstensifikasi Food Estate dan sudah ditumbuhi bibit sawit ©Pantau Gambut 2024

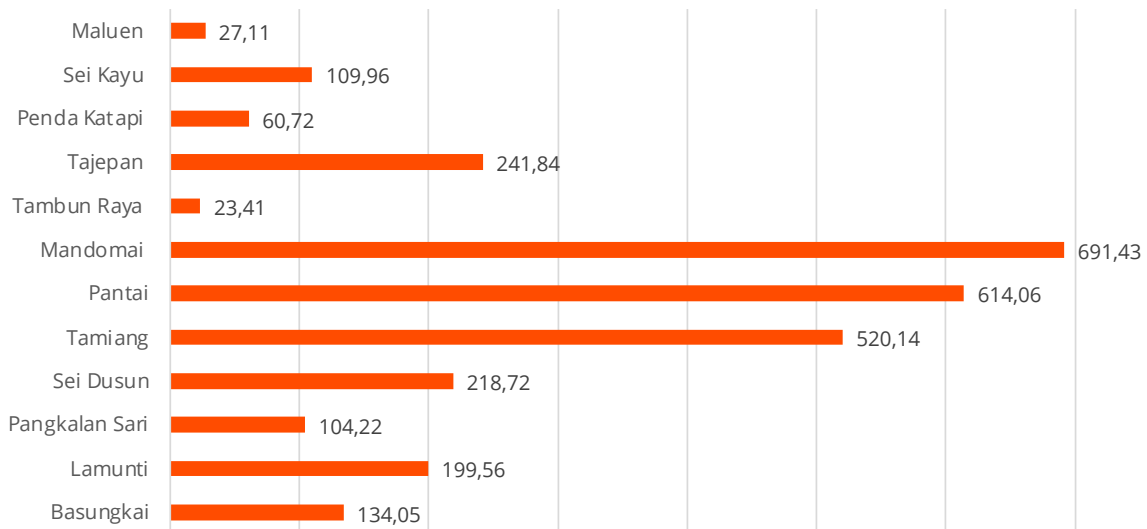
3.3.

Kehilangan Tutupan Pohon pada Area Ekstensifikasi

Berbicara tentang pembukaan lahan pasti akan selalu berkorelasi dengan hilangnya tutupan pohon. Berdasarkan analisis data dari citra satelit, Pantau Gambut menemukan adanya luasan kehilangan tutupan pohon yang signifikan di area-area yang dijadikan target ekstensifikasi proyek tersebut. Jika dilakukan penelusuran mundur, sebagian besar lahan yang telah dibuka untuk perluasan Food Estate ini didominasi vegetasi dengan kerapatan yang sedang dan cukup rapat.

Sepanjang tahun 2022, tutupan pohon seluas 2.945,26 hektare telah hilang di area ekstensifikasi Food Estate. Jika dikonversi menjadi lapangan sepak bola, luasan tersebut mampu menampung hingga 4.207 lapangan dalam satu hamparan. Kehilangan tutupan pohon ini tersebar di 12 desa yang terdampak. Kehilangan tutupan pohon terjadi juga di area kawasan fungsi lindung ekosistem gambut yakni sebesar 13 hektare dari total keseluruhan area yang terbuka. Desa Pantai dan Mandomai menjadi kedua wilayah dengan luas kehilangan tutupan pohon yang terbesar.

Gambar 6 Luas Kehilangan Tutupan Lahan per Desa (Ha)



Pada gambar 8 dan 10 terlihat bahwa ekstensifikasi lahan dilakukan di kawasan dengan tutupan pohon yang cukup rapat. Aktivitas tersebut tampak melampaui batas yang telah ditentukan. Berdasarkan Peta Kerja SID, area yang seharusnya dibuka sudah diatur dengan jelas. Namun, pembukaan lahan tersebut meluas hingga ke kawasan di sekitarnya, yang tidak semestinya mengalami perubahan penggunaan lahan.

Tutupan pohon yang awalnya berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kini telah hilang di beberapa area dan mengancam ekosistem gambut yang ada di dalamnya.³² Imbas kehilangan tutupan pohon ini adalah terjadinya banjir saat musim penghujan dan karhutla di musim kemarau pada setiap tahunnya.³³

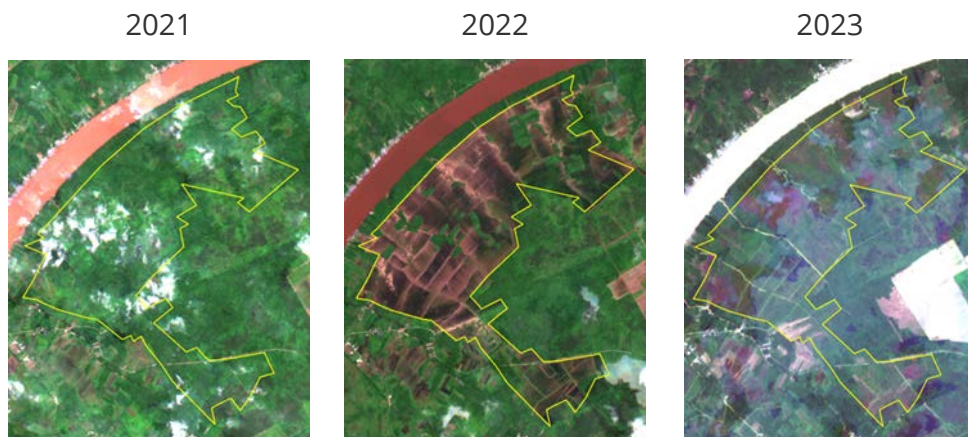
32 Barbara Fraser. 2024. *Study reveals extent and impact of Peru peatland degradation*. <https://forestsnews.cifor.org/88422/study-reveals-extent-and-impact-of-peru-peatland-degradation?fnl=en>

33 Tempo.co. 2005. *Banjir Rendam Areal Transmigrasi Kapuas*. <https://koran.tempo.co/read/nusa/38648/banjir-rendam-areal-transmigrasi-kapuas>

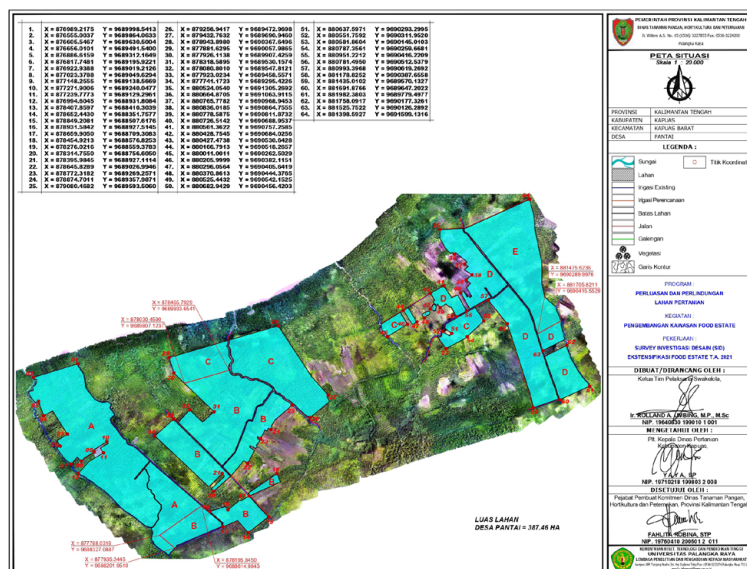
Gambar 7 Peta Kerja SID Ekstensifikasi Food Estate Desa Mandomai
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 8 Peta Kehilangan Tutupan Pohon di Desa Mandomai
 Sumber: Olahan Pantau Gambut dari Citra Sentinel 2



Gambar 9 Peta Kerja SID Ekstensifikasi Food Estate Desa Pantai
 Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 10 Peta Kehilangan Tutupan Pohon di Desa Pantai

Sumber: Olahan Pantau Gambut dari Citra Sentinel 2



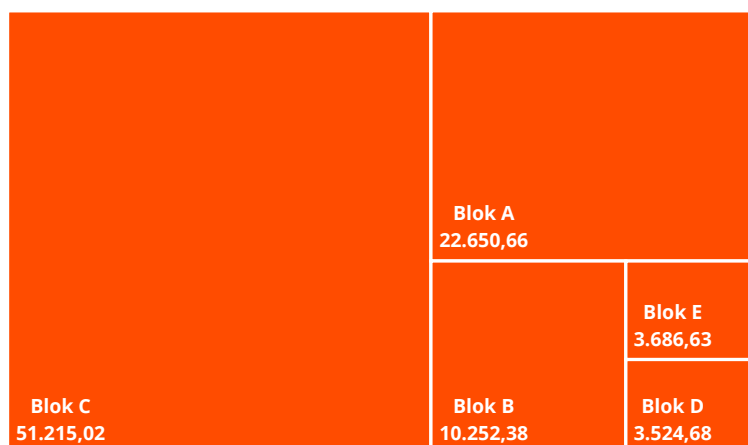
3.4. Kebakaran Hutan dan Lahan di Area Eks-PLG

Jika tutupan hutan di atas lahan gambut dibuka, gambut akan terekspos dengan sinar matahari terus menerus. Apabila terlalu lama dibiarkan dan tidak dikembalikan tutupan vegetasinya, gambut akan semakin kering dan berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rentetan inilah yang terjadi di kawasan yang dulunya menjadi bagian dari proyek PLG.

Berdasarkan data dari KLHK yang diolah Pantau Gambut, ditemukan adanya kebakaran pada kawasan seluas 434.277 hektare sepanjang 2015 hingga 2020 akibat kerusakan lahan gambut di area eks-PLG. Kawasan ini pun turut menyumbang 249.346 hektare luasan area terbakar pada tragedi karhutla besar 2015. Empat tahun kemudian, kebakaran kembali melanda dengan luas lahan terbakar mencapai 153.193 hektare.

Yang terbaru, pada 2023, hasil analisis Pantau Gambut mencatat adanya kebakaran pada 91.352 hektare area eks-PLG. Ironisnya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Blok C eks-PLG yang menjadi area Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Kawasan yang seharusnya sama sekali tidak boleh terbakar ini justru dihabisi oleh api hingga seluas 48.955 hektare. Sementara, 42.334 hektare sisanya membakar kawasan fungsi ekosistem budidaya.

Gambar 11 Luas Karhutla di Lahan Eks-PLG Tahun 2023 (Ha)



Area PT WUL yang seharusnya tidak ada di lokasi tersebut pun tidak ketinggalan mencatatkan angka karhutla. Dua desa yang berdekatan dengan PT WUL ikut terdampak. Desa Tajepan menjadi desa terparah karena 713 hektare areanya terbakar pada tahun 2023. Sementara,

100,18 hektare area Desa Palingkau Asri dan Tajepan yang bertumpang tindih dengan area PT WUL juga terbakar di tahun yang sama. Kejadian ini menunjukkan betapa rawannya wilayah ini terhadap kebakaran³⁴, terutama di lahan yang sudah mengalami degradasi akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali.

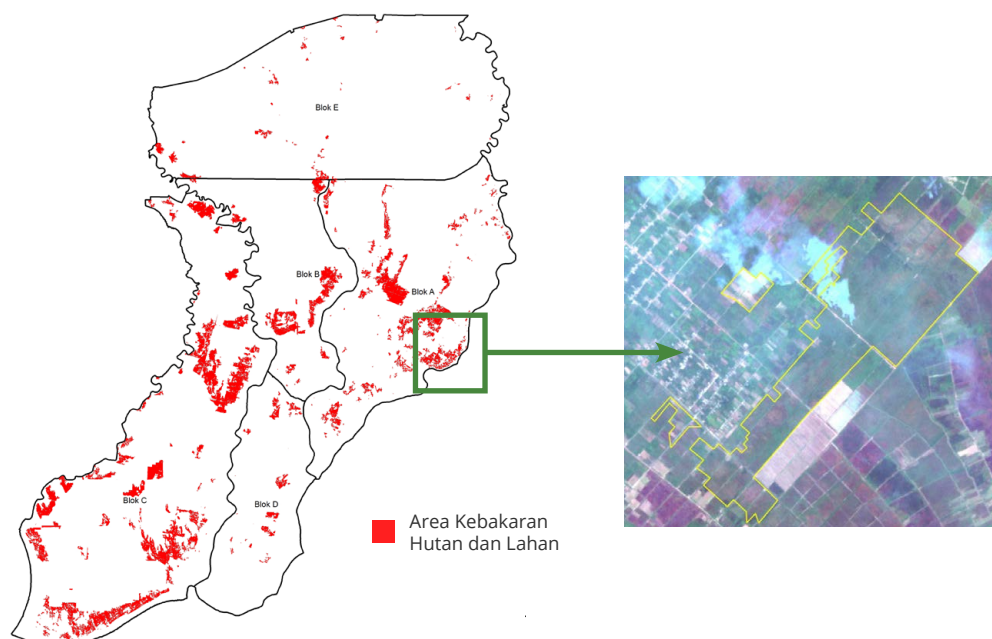
Tidak Hanya Asap

Masalah karhutla di area eks-PLG bukan hanya soal asap yang menyesakkan, tetapi juga mengenai kerusakan ekosistem gambut yang parah. Kawasan hidrologis gambut yang seharusnya menjadi benteng penahan air dan karbon kini berubah menjadi lahan yang rentan terhadap kekeringan dan kebakaran.³⁵ Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh proyek PLG yang dimulai pada era Soeharto, dimana pembukaan lahan dilakukan dengan mengeringkan ekosistem gambut melalui kanalisasi skala besar.

Habitat berbagai satwa dilindungi seperti orangutan pun terancam. Asap yang dihasilkan oleh karhutla di kawasan eks-PLG kerap menyeberang ke Taman Nasional (TN) Sebangau yang berdekatan dengan Blok C. Padahal, TN Sebangau masih memiliki fungsi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengatur tata air alami di kawasan tersebut.

Lahan gambut yang sudah terbakar seharusnya dipulihkan, sebagaimana dimandatkan oleh PP No. 57 Tahun 2016 *jo*. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Di samping itu, pasal tersebut juga mempertegas kerusakan yang disebabkan baik oleh PLG ataupun Food Estate. Kedua proyek ambisius ini terbukti memiliki drainase buatan berupa kanal dan berkurangnya tutupan lahan. Melihat pola pelaksanaan pembangunan yang serupa, Food Estate rasa-rasanya akan membawa kita ke arah yang sama dengan PLG.

Gambar 13 (Kiri) Peta Kebakaran Hutan & Lahan Eks-PLG 2023 dan (Kanan) Asap kebakaran yang terpotret di area ekstensifikasi FE Desa Palingkau Asri, Kab. Kapuas
Sumber: Olahan Pantau Gambut dari Citra Sentinel 2



34 Almi Ramadhi, et. al. 2023. *Waspada Api: Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Tahun 2023*.

35 Safrudin. 2020. *Food Estate Keberlanjutan Masalah di Eks-PLG?*. <https://luk.staff.ugm.ac.id/raha/PLG/2020SafrudinFoodEstateDiEksPLG.pdf>

3.5.

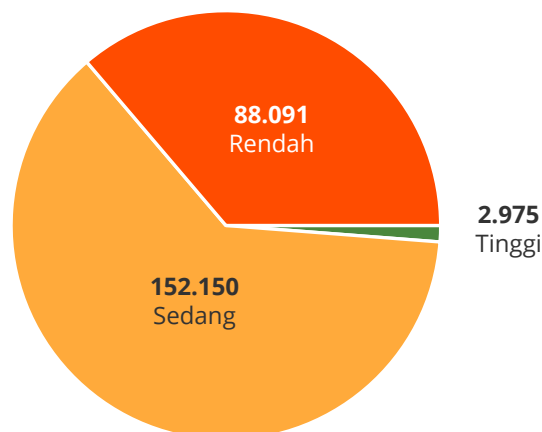
Kesesuaian Lahan Pertanian Padi

Tidak semua tanaman bisa tumbuh subur di lahan gambut. Ini juga berlaku pada padi jenis irigasi dan tadah hujan yang menjadi salah satu komoditas andalan Food Estate Kalimantan Tengah.³⁶ Umumnya, kedua varietas padi ini tumbuh di lahan yang memiliki tingkat keasaman (pH) netral di kisaran 5–6. Namun, menanam varietas tersebut di tanah gambut yang berkarakter asam dan miskin hara pada akhirnya hanya akan menciptakan kerugian.

Usaha yang luar biasa besar diperlukan untuk bisa ‘memaksa’ varietas tersebut tumbuh subur. Selain penyediaan bibit untuk memenuhi kebutuhan proyek Food Estate Kalimantan Tengah seluas 4.207 lapangan bola, tanah gambut seluas ini juga harus ditebari kapur atau dolomit. Kapur ini adalah hal mutlak yang bisa dilakukan untuk menaikkan pH tanah dan menetralkan keasamannya. Pemanfaatan pupuk organik juga penting guna menjaga kesuburan tanah gambut yang umumnya miskin hara.³⁷

Karena bermacam faktor tersebut, tidak sembarang titik menjadi ideal untuk ditanami padi. Untuk mendapatkan gambaran sebaran kesesuaian lahan, Pantau Gambut mengambil tiga dari lima blok lahan eks-PLG (lihat bab 2.2) sebagai sampel pemantauan proyek Food Estate untuk penanaman komoditas padi.

Gambar 14 Tingkat Kesesuaian Lahan (Ha)



Dari 3 blok eks-PLG dengan total luas 243.216 hektare yang dianalisis oleh Pantau Gambut, hanya 1% hektare yang benar-benar sesuai sebagai lahan pertanian. Kontras dengan lahan yang memang sesuai untuk ditanami, 63% total lahan masuk kategori sedang dan 36% total lahan justru masuk kategori rendah. Jika diakumulasi, 99% lahan eks-PLG kurang dan bahkan tidak layak dijadikan area pertanian produktif skala besar.

Sementara, jika melihat pada 30 titik sampel yang tersebar ke dalam 19 desa, hanya 10% luas area ekstensifikasi yang memiliki kesesuaian tinggi untuk ditanami komoditas padi. Sementara sisanya hanya memiliki kesesuaian sedang dan rendah. Dengan kata lain, lahan pada 30 titik

³⁶ Eli Nur Nirmala Sari. 2020. *Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut*. <https://www.mongabay.co.id/2020/06/22/peluang-dan-tantangan-pertanian-padi-berkelanjutan-di-lahan-gambut/>

³⁷ Neneng Laela Nurida, et. al. 2014. *Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. ISBN: 978-602-8977-82-1

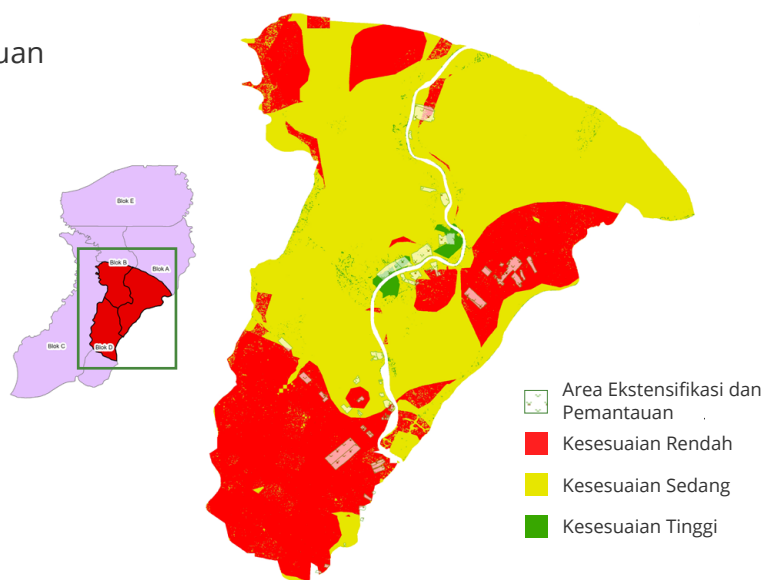
sampel ini kurang dan tidak layak menjadi area ekstensifikasi Food Estate. Sebaran kesesuaian lahan berada di 19 desa dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 6 Tingkat Kesesuaian Lahan pada Area Ekstensifikasi

No	Desa Pemantauan	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Basarang	567,56	1,27	-
2	Basunkai	43,88	81,10	-
3	Betawa Permai	12,96	-	-
4	Budi Mufakat	45,08	-	-
5	Maluen	49,15	-	-
6	Mandomai	-	204,25	213,21
7	Mintin	23,18	120,60	0,19
8	Murung Keramat	180,11	22,54	-
9	Palingkau Asri	375,00	1,07	-
10	Palingkau Jaya	844,00	4,26	-
11	Pangkalan Rekan	404,58	2,02	-
12	Pangkalan Sari	23,85	86,73	-
13	Pantai	58,22	688,40	162,52
14	Penda Katapi	-	108,47	165,17
15	Sei Dusun	-	235,44	0,45
16	Sei Kayu	-	139,99	1,91
17	Tajepan	270,90	3,78	-
18	Tambun Raya	84,14	111,08	-
19	Tarung Manuah	122,05	1,98	-
Total		3.104,66	1.812,98	543,45

Berkenaan dengan hal tersebut, Pantau Gambut mencurigai bahwa proses penetapan lahan ekstensifikasi ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan cenderung hanya untuk memenuhi target area cetak sawah baru tanpa memperhatikan kondisi lapangan. Dugaan ini diperkuat dengan adanya temuan area yang telah ditanami oleh warga seperti di desa Pantai dan Mandomai ternyata tidak subur, dan kini malah terbengkalai serta dibiarkan begitu saja.

Gambar 14 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Area Pemantauan Ekstensifikasi Food Estate Kalimantan Tengah
Sumber: Olahan Pantau Gambut





Lahan terbengkalai yang menjadi area ekstensifikasi Food Estate di Desa Palingkau Asri, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ©Pantau Gambut 2024

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1.

Kesimpulan

Saling Bertumpang Tindih

Tumpang tindih regulasi menjadi isu utama di proyek Food Estate Kalimantan Tengah. Banyak ditemukan area Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang bertumpang tindih dengan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) ataupun Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Pantau Gambut juga menemukan tumpang tindih status lahan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) yang beralih untuk kegiatan budidaya.

Hadirnya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) juga menambah ruwetnya proyek ini. UUCK memberikan keleluasaan kepada Food Estate karena statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan bekingan UUCK, Food Estate mendapatkan banyak pengecualian pada standar-standar perlindungan lingkungan yang sebelumnya ada seperti melonggarnya standar perlindungan ekosistem gambut yang diatur dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tumpang tindih status lahan juga berkorelasi dengan tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga. Pada proyek Food Estate padi di Kalimantan Tengah, setidaknya ada tiga kementerian dan lembaga yang terlibat: Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Tugas pokok dan fungsi yang saling bertindihan membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan transparansi informasi perkembangan proyek ini. Jika begitu, fungsi pengawasan masyarakat akan terhambat sehingga memperbesar risiko penyimpangan regulasi, korupsi, dan kerusakan lingkungan.

Menolak Belajar Dari Masa Lalu

Lahan gambut terbukti tidak sesuai untuk budidaya padi yang dibawa oleh proyek Food Estate. Telah banyak studi yang menyoroti kegagalan proyek ini di masa lalu atau pun saat ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dalam kurun waktu yang tidak sebentar pula. Namun ambisi mendapatkan validasi membuat pemerintahan Joko Widodo memilih untuk tidak belajar.

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di era Soeharto sudah memberikan pelajaran bahwa lahan gambut dengan tingkat keasaman tinggi, rendah nutrisi, dan rentan kebakaran tidak cocok untuk pertanian skala besar. Ketidaksiuaian lahan ini kembali terlihat dalam program Food Estate saat ini, di mana hasil panen jauh di bawah target, dan sebagian besar

lahan yang telah dibuka terbengkalai, ditambah ada temuan sawit pada area tersebut.

Regulasi jelas melarang pembukaan lahan gambut yang berfungsi sebagai kawasan lindung, tetapi proyek Food Estate justru melanggar peraturan ini dengan mengeringkan dan membuka kembali lahan gambut yang rusak akibat PLG sebelumnya. Lahan gambut yang rusak tersebut seharusnya dipulihkan, bukan dijadikan area budidaya monokultur skala luas seperti Food Estate.

Kegagalan berulang dari program Food Estate di Kalimantan Tengah tidak bisa dilepaskan dari ketidaksesuaian lahan dan pengelolaan yang buruk. Menurut data pemantauan, sekitar 50% dari lahan yang telah dibuka kini terbengkalai, dan sebagian lahan yang aktif justru ditanami kelapa sawit, bukan komoditas pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kegagalan PLG dan tetap memaksakan penggunaan lahan yang tidak sesuai.

Sosial dan Lingkungan, Semua Terdampak

Ekosistem gambut menjadi korban. Tidak hanya biodiversitas yang ada di dalamnya, masyarakat yang hidup di atasnya juga terdampak. Bahkan, penduduk bumi yang jauh dari Kalimantan Tengah ikut merasakan dampak yang terakumulasi.

Bagi masyarakat lokal, Food Estate menghilangkan akses terhadap lahan produktifnya. Selain pemerintah pusat yang menjauhkan mereka dari tanahnya, kehadiran perusahaan dengan izin HGU yang areanya bertumpang tindih dengan wilayah masyarakat juga memperburuk keadaan. Tanpa sosialisasi dan pendampingan yang memadai, masyarakat kesulitan mengelola lahan dan akhirnya harus berhadapan dengan lahan-lahan yang rusak dan tidak subur.

Ekstensifikasi lahan Food Estate juga menghilangkan tutupan pohon secara masif di berbagai desa di Kalimantan Tengah. Menurut analisis citra satelit Pantau Gambut, antara 2021 dan 2023, kehilangan tutupan pohon mencapai 2.945 hektare di area eks-PLG. Pada tahun 2022, yang sebagiannya juga terjadi di kawasan fungsi lindung gambut. Hilangnya tutupan hutan ini berhubungan langsung dengan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahun, terutama di area gambut yang telah terdegradasi akibat kanal-kanal yang dibangun pada masa PLG.

4.2.

Rekomendasi

1. Pemerintah Harus Mengevaluasi dan Menghentikan Proyek Food Estate

Proyek Food Estate (FE) di Kalimantan Tengah yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Bukti kegagalan beruntun yang menciptakan jejak kerusakan lingkungan dan ekosistem gambut, cukup menjadi alasan untuk menghentikan proyek ini. Evaluasi ini krusial mengingat pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih meletakkan program Food Estate sebagai bagian dari 17 program prioritas dalam dokumen visi-misinya.³⁸

Evaluasi ini mencakup beberapa aspek. Namun, kesesuaian lahan, efektivitas tata kelola,

³⁸ Abil Salsabila, Wahyu Perdana, Yoga Aprillianno, Iola Abas. 2023. *Melihat Rekam Jejak Sikap Partai Pendukung Calon Presiden*. https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/melihat-sikap-partai-pendukung-capres-3zwjd.pdf

dan dampak sosial-ekologis harus menjadi prioritas. Berdasarkan temuan dari pemantauan lapangan, banyak lahan yang tidak cocok untuk ditanami padi atau komoditas pangan lainnya. Memaksa gambut yang memiliki tingkat keasaman tinggi hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

2. Pemerintah Harus Menghentikan Eksploitasi Gambut dan Rehabilitasi Ekosistem Gambut yang Terdegradasi

Pemerintah harus menghentikan eksploitasi lahan gambut dan fokus untuk merehabilitasi lahan gambut yang telah rusak. Fungsi ekologisnya sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air alami harus kembali. Rehabilitasi ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 *jo.* PP No. 71 Tahun 2014 yang menegaskan perlunya perlindungan ekosistem gambut. Pengeringan gambut untuk pertanian padi dalam proyek FE hanya akan memperparah dampak lingkungan dan mempercepat proses kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

3. Pemerintah Harus Meninjau Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Upaya evaluasi kebijakan PSN akan menyentuh banyak hal mendasar di regulasi yang berlaku saat ini. Hal ini mengingat program Food Estate yang masuk dalam PPSN 2020–2024 mendapatkan tempat istimewa dalam UUCK. Percepatan pelaksanaan PSN berulang kali disebutkan dalam konsiderans ‘Menimbang’ dalam UUCK serta masuk dalam definisi ‘Cipta Kerja’ pada bagian ketentuan umum. Beberapa perundang-undangan pun disesuaikan agar pelaksanaan PSN menjadi mulus.

Beberapa peraturan mencakup UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan yang paling signifikan adalah diperkenalkannya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk PSN. Kemudahan investasi untuk menyokong PSN pun juga diatur secara spesifik pada Pasa 154–173 UU Cipta Kerja.

Kebijakan PSN harus ditinjau ulang. PSN tidak boleh mengorbankan standar lingkungan karena keleluasaan besar bagi proyek berskala nasional yang diberikan UU Cipta Kerja. Setiap proyek, baik yang terdaftar sebagai PSN maupun tidak, harus tunduk pada standar lingkungan yang ketat. Ini penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan bencana ekologis, seperti yang telah terjadi pada proyek FE di Kalimantan Tengah.

4. Pemerintah Harus Mengutamakan Kedaulatan Pangan Berbasis Lokal dengan Pendekatan yang Sesuai Ekosistem Gambut

Pemerintah harus menggantikan pendekatan ketahanan pangan berbasis agri-bisnis dengan kedaulatan pangan berbasis lokal. Perkebunan monokultur skala besar terbukti tidak efektif di wilayah gambut. Sebaliknya, paludikultur atau praktik pertanian yang memanfaatkan lahan basah tanpa mengeringkan gambut, harus diadopsi sebagai strategi utama dalam mengelola lahan gambut dengan meletakkan komunitas dan petani lokal sebagai subyek utama.

Penyediaan pangan kepada warga negara merupakan hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah. Meski begitu, tidak tepat jika urusan ini justru mengesampingkan dimensi ekologi dan sosial-budaya masyarakat lokal. Apalagi kalau proyek strategis nasional ini hanya menjadi arena untuk mengais validasi atau memperkaya diri. Menyedihkan jika masyarakat harus terperosok untuk menanggung beban proyek swasembada pangan yang berakhir menjadi swanelangsa pangan di lumbung nasional.



pantau gambut